

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berlokasi di Jakarta, pasar modal di Indonesia secara resmi telah berdiri sejak 14 Desember 1912 dan dikenal dengan nama *Vereniging voor de Effetenhandel*. Adanya perkembangan yang memuaskan terhadap berdirinya *Vereniging voor de Effetenhandel*, pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan bursa efek di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925. Namun, dikarenakan perekonomian nasional lebih diarahkan pada perekonomian sosialis, bursa efek di Indonesia ditutup pada tahun 1958 dan kemudian bursa efek kembali dibuka oleh Presiden RI pada tanggal 10 Agustus 1977.

Diadakannya merger kedua pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, pada tahun 2007 membuat bursa efek di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kedua bursa efek tersebut berhasil melakukan merger dengan legal pada 1 Oktober 2007, dibawah pengawasan dan koordinasi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Terjadinya merger kedua bursa efek tersebut membuat perubahan nama menjadi nama yang kita kenal saat ini, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI memulai operasional pertama pada tanggal 3 Desember 2007.

Terdapat beberapa tahapan pengimplementasian merger bursa efek tersebut. Tahapan pertama merupakan penyatuan perdagangan saham di *Jakarta Automated Trading Sistem* (JATS), sedangkan untuk perdagangan produk-produk eks BES lainnya tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan aturan eks-BES. Tahapan kedua dilakukan pada 26 Desember 2007 dimana tahapan ini memindahkan mesin-mesin eks-BES ke lokasi yang sama dengan JATS. Tahapan terakhir dilakukan pada awal Februari 2008 dimana pada tahap ini dilakukan perpindahan karyawan dari Gedung Bapindo ke Gedung Bursa Efek Jakarta (Rezy, 2017)

Perusahaan yang terdaftar di BEI dijadikan objek dalam penelitian ini. Dipilihnya BEI sebagai objek penelitian adalah karena setiap perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan *go public*. Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan sehingga data tersebut dapat digunakan peneliti untuk penelitian ini. Hal tersebut dapat mempermudah peneliti untuk melakukan proses penelitian ini karena dapat mengefektifkan dan mengefisiensi waktu dan biaya.

Seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga dikelompokkan berdasarkan industri/usaha yang dimilikinya. Perusahaan-perusahaan tersebut dibedakan menjadi 3 sektor yaitu sektor utama, manufaktur, dan jasa. Sektor utama terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan, sektor sekunder terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, dan sektor tersier terdiri dari sektor properti dan *real estate*, sektor transportasi, utilitas, dan infrastruktur, sektor keuangan, sektor perdagangan, jasa dan investasi. Sektor non-keuangan menjadi objek dalam penelitian ini. Dipilihnya sektor non-keuangan sebagai objek penelitian adalah karena sektor-sektor non-keuangan dalam proses bisnisnya berkaitan dengan sumber daya alam (Ariwendha & Hasyir, 2017).

Dilansir dari [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id), Ali Darwin, *Chairman National Center of Sustainability Report (NCSR)*, menyatakan bahwa dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 hanya terdapat 6,54% yang selama tiga tahun berturut-turut konsisten dalam menerbitkan *sustainability report*.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan Keberlanjutan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau organisasi dimana dalam laporan tersebut perusahaan atau organisasi mengungkapkan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur, memahami, dan mengomunikasikan kinerja perusahaan dalam ekonomi, lingkungan, sosial, lingkungan, dan tata kelola (*Global Reporting Initiative, 2018*). Membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam bisnis dan pemerintahan merupakan hal yang

fundamental untuk tercapainya ekonomi yang berkelanjutan. Setiap harinya, keputusan dibuat oleh bisnis-bisnis dan pemerintahan dimana hal tersebut berdampak langsung pada *stakeholder* seperti institusi keuangan, organisasi buruh, dan masyarakat. Sihotang (2006:202) mendefinisikan bahwa *sustainability report* merupakan pelaporan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari dampak kinerja perusahaan dan produknya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *Single Bottom Line* (SBL), yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi ekonomi (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada *Triple Bottom Line* (TBL) yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) (Aulia Z & Kartawijaya, 2011).

Pandangan mengenai orientasi perusahaan terhadap keuntungan berubah seiring dengan munculnya berbagai kasus yang merugikan lingkungan. Paradigma ini tidak lagi mengacu hanya pada keuntungan (*profit*) saja, melainkan berubah menjadi keuntungan (*profit*), orang (*people*), dan lingkungan (*planet*) (Aulia & Syam, 2013). Hal ini membuat organisasi bisnis modern mendapat tekanan dari para *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk membenarkan kegiatan operasi mereka guna menghasilkan keuntungan (Villier et al, 2014).

Konsep laporan keberlanjutan tidak terlepas dari teori-teori pendukung seperti teori legitimasi. Menurut Kirana (2009), teori legitimasi mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan agar diterima masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Adam (Hamdani et al, 2017) menjelaskan bahwa aktivitas sosial dan lingkungan ini yang kemudian dapat diungkapkan melalui laporan keberlanjutan dimana dalam penyusunannya berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* dan dapat digunakan berbagai sektor perusahaan di seluruh negara. Selain itu, menurut Dierkes & Antal (Badjuri, 2011) dalam teori legitimasi ditemukan adanya *social*

*contract* dan dimensi atas kontrak yang secara potensial dapat meningkat karena diversifikasi aktivitas internasional perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan mungkin juga dapat dilihat sebagai alat untuk membentuk, mempertahankan, dan memperbaiki legitimasi perusahaan dimana mereka mengeluarkan opini dan kebijakan publik dan dapat mereduksi *political, social and economic exposure and pressure* (Patten dalam Rifqiyah, 2016).

Laporan keberlanjutan belakangan menjadi isu perkembangan utama perusahaan dikarenakan terjadinya serangkaian tragedi kerusakan lingkungan di berbagai daerah (Nurrahman & Sudarno, 2013). Tragedi lumpur panas Lapindo, pencemaran air sungai oleh perusahaan tambang PT. Arutmin Indonesia ([www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org)), perusakan lingkungan oleh PT. Freeport ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)), pencemaran air di teluk Balikpapan oleh aktivitas pertambangan ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)), dan sebagainya membuktikan ketidaktanggungjawaban perusahaan atas dampak dari aktivitasnya dan seolah-olah hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Perusahaan-perusahaan di dunia telah menyadari akan pentingnya laporan keberlanjutan, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) menemukan bahwa pada rentang tahun 2008-2011 terjadi peningkatan sebesar 14% pada pengungkapan laporan keberlanjutan usaha perusahaan tersebut. Di tahun 2011, sebanyak 95% dari perusahaan yang terdaftar di *Fortune* 250 telah membuat laporan keberlanjutan usaha (KPMG, 2011). Pada tahun 2010, jumlah korporasi global yang melakukan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru sekitar 600 perusahaan. Pada tahun 2007 jumlahnya telah mencapai lebih dari 2.500 perusahaan, dan pada akhir tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah perusahaan global yang melaporkan kegiatan CSR, lebih dari 4.000 perusahaan telah melaporkan kegiatan CSR. Namun, perusahaan di Asia hanya menyumbang 600 perusahaan (*Corporate Register*, 2014)

CSR di Indonesia muncul pada akhir dekade 1990-an, dimana CSR tersebut ada dikarenakan adanya gerakan sosial yang mulai berkembang di Indonesia serta kesadaran perusahaan (terutama perusahaan asing) sendiri yang mengindikasikan bahwa pendekatan keamanan tidak bisa lagi dipergunakan, harus digantikan dengan

pendekatan kesejahteraan. CSR dinilai penting pada saat banyaknya pemberian penghargaan untuk perusahaan di tahun 2000-an. Walaupun pemberian penghargaan tersebut hanya bersifat apresiasi awal (belum sebagai penilaian kinerja yang ketat) namun berbagai penghargaan itu telah membuat beberapa perusahaan yang progresif menjadi terkenal. Pertukaran pengalaman terjadi dalam *event* penghargaan dan biasanya berlanjut menjadi kunjungan belajar. Sejak pertengahan 2000-an, beberapa perusahaan sudah mulai membuat pelaporan periodik mengenai aktivitas dan kinerja sosial dan lingkungan. Perusahaan yang progresif menggunakan standar dari *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk membuat laporan keberlanjutan usaha tersebut.

Diselenggarakannya *Indonesian Sustainability Report Award* (ISRA) setiap tahun secara tidak langsung mendorong perkembangan atas laporan keberlanjutan usaha bagi perusahaan di Indonesia. Laporan keberlanjutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial. Sedangkan pernyataan yang tidak bersifat *mandatory* telah diungkapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 (revisi 2012) paragraf 23 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. Walaupun pernyataan dari IAI ini tidak bersifat wajib, IAI menyarankan agar meningkatkan tingkat kepedulian organisasi atau perusahaan akan lingkungan dan sosial sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Banyak perusahaan yang menyadari bahwa laporan keberlanjutan telah menjadi tren di era global saat ini. Menurut *Report of The Judges SRA 2011*, selama lima tahun terakhir semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kesadaran sektor swasta yang lebih besar dari dampaknya terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, tetapi kesadaran yang semakin meningkat akan perlunya untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan melalui komunikasi transparan (<http://swa.co.id>). Namun menurut OJK pengungkapan laporan keberlanjutan saat ini masih bersifat sukarela (*voluntary*). Walaupun masih bersifat sukarela, terdapat 6,68% perusahaan

yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengungkapkan laporan keberlanjutan dan hampir sebagian besar mengacu pada standar pengungkapan yang ada dalam *Global Reporting Index* (GRI).

**Tabel 1.1 Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017**

Sektor	Jumlah			
	2014	2015	2016	2017
Sektor Aneka Industri	1	1	1	1
Sektor Industri Barang Konsumsi	2	1	2	3
Sektor Industri Dasar dan Kimia	3	3	3	3
Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	5	5	6	5
Sektor Keuangan	14	15	11	10
Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi	3	3	3	5
Sektor Pertambangan	7	6	7	9
Sektor Pertanian	3	3	4	4
Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	3	4	3	6
Total Perusahaan	41	41	40	46

(Sumber: Data yang telah diolah 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 sebanyak 41 perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengalami penurunan yaitu sebanyak 40 perusahaan yang mana jumlah ini sama dengan tahun 2014. Namun, pada tahun 2017 sebanyak 46 perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan yang mana jumlah ini merupakan jumlah terbanyak selama 4 tahun terakhir dalam hal menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor yang mendominasi dalam hal pengungkapan laporan keberlanjutan adalah sektor keuangan dan jumlah perusahaan yang paling sedikit menerbitkan laporan keberlanjutannya adalah sektor aneka industri.

Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 613 perusahaan, jumlah tersebut masih sangat sedikit dalam menerbitkan laporan keberlanjutannya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya antusias perusahaan untuk memahami tentang kepentingan dari peran lingkungan dan sosial yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, serta belum adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan himbuan kepada tiap perusahaan untuk lebih dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membantu melestarikan lingkungan dan sosial di sekitar kegiatan operasional perusahaan (Nasir et al, 2014). Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perusahaan-perusahaan yang di Indonesia terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan secara lebih mendalam.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan adalah profitabilitas (Nasir et al, 2014). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2015). Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Nasir et al (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi peningkatan profitabilitas dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk mengungkapkan informasi akan lebih meningkat pula. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang tinggi sehingga perusahaan akan memiliki dana yang cukup untuk menerbitkan laporan keberlanjutan serta membiayai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial (Suryono & Prastiwi, 2011).

**Tabel 1.2 Fenomena Profitabilitas 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Profitabilitas (diproksikan dengan <i>Return on Asset</i>)</b>	<b>Rata-Rata Item yang Diungkapkan</b>
<b>2015</b>	0,04428	34
<b>2016</b>	0,05145	28
<b>2017</b>	0,05902	24

(*sumber*: data yang diolah 2018)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari ROA pada perusahaan non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2015-2017. Dapat dilihat pada tahun 2015 rata-rata ROA sebesar 0,04428 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0,05145. Pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan menjadi 0,05902. Namun, berdasarkan data terdapat 4 perusahaan pada tahun 2015 memiliki nilai ROA negatif tetapi tetap menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2016 terdapat 2 perusahaan dan pada tahun 2017 terdapat 1 perusahaan yang memiliki ROA negatif namun tetap menerbitkan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Aulia & Syam (2013), Ibrahim et al (2015), dan Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, penelitian yang dilakukan Orazalin & Mahmood (2018) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. Fahriza (2014) juga menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor lainnya yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah *leverage*. *Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Raharjo, 2005). Menurut Nasir et al (2014) semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari *annual report* dikarenakan dalam mempublikasikan *sustainability report* perusahaan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Selain itu, tingkat *leverage* yang tinggi membuat perusahaan cenderung berfokus untuk meningkatkan kinerja ekonominya daripada mengungkapkan laporan keberlanjutan.

**Tabel 1.3 Fenomena *Leverage* 2015-2017**

Tahun	Rata-Rata <i>Leverage</i> (diproksikan dengan <i>Debt to Equity Ratio</i> )	Rata-Rata Item yang Diungkapkan
2015	1,27887	34
2016	1,09631	28
2017	1,29495	24

(sumber: data yang diolah 2018)



Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata *leverage* pada perusahaan non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai rata-rata adalah sebesar 1,27887 dan mengalami penurunan menjadi 1,09631 pada tahun 2016. Nilai rata-rata *leverage* mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 1,29495. Pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai DER diikuti penurunan jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan pada non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasir et al (2014), Aulia & Syam (2013), dan Ahmad (2014) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, penelitian ini insignifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Marsono (2013) dan Suryono & Prastiwi (2011). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor berikutnya yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal, misalnya jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, maupun kapitalisasi pasar (Putri A. M., 2012). Diungkapkan dalam Suryono & Prastiwi (2011) bahwa semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Dalam kondisi demikian, perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya. Penelitian ini mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan.

**Tabel 1.4 Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

Tahun	Rata-Rata Ukuran Perusahaan (diproksikan dengan Ln Total Aset)	Rata-Rata Item yang Diungkapkan
2015	30,70769	34
2016	30,78079	28
2017	30,92756	24

(sumber: data yang diolah 2018)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2016 setiap kenaikan nilai ukuran perusahaan non keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengalami penurunan jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Namun gejala berbeda terjadi pada tahun 2017 yang mana terjadi kenaikan nilai ukuran perusahaan diikuti penurunan jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Ahmad (2014), Ibrahim et al (2015), dan Aulia & Syam (2013) menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat praktik pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan. Penelitian tersebut insignifikan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Nasir et al (2014) dan Abdul Aziz (2014). Mereka mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. Orazalin & Mahmood (2018) dan Fahriza (2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor berikutnya yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah kepemilikan publik. Setiap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik sehingga semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Kepemilikan publik merupakan salah satu dari bagian struktur kepemilikan dalam perusahaan yang mana pihak publik yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang berada diluar manajemen perusahaan dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan Indraswari & Mimba (2017). Selain itu, kepemilikan saham yang dimiliki masing-masing < 5% sehingga sering disebut sebagai pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham yang tinggi mengindikasikan item yang diungkapkan laporan keberlanjutan juga tinggi. Walaupun sebagai pemegang saham minoritas, perusahaan merasa perlu untuk mengungkapkan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosialnya untuk menjaga kredibilitas dari masyarakat. Kredibilitas yang tinggi pada masyarakat dapat membuktikan bahwa perusahaan dapat memberikan imbalan (dividen) dan juga perusahaan mampu beroperasi secara terus menerus (*going concern*) sehingga pengungkapan laporan keberlanjutan pun akan semakin luas.

**Tabel 1.5 Fenomena Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Total Bangun Persada Tbk periode 2015-2017**

Tahun	Rata-Rata Kepemilikan Publik	Rata-Rata Item yang Diungkapkan
2015	0,31736	34
2016	0,32847	28
2017	0,32838	24

(sumber: data yang diolah 2018)

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan rata-rata jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan diikuti penurunan rata-rata kepemilikan saham oleh publik. Namun, pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan rata-rata jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan diikuti oleh kenaikan rata-rata kepemilikan saham oleh publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu & Anisyukurillah (2015), Pertiwi et al (2017), Indraswari & Mimba (2017), Hamdani et al (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Jannah & Ansori (2016) dan Wakidi & Siregar (2011) mengemukakan bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan saham publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Terdapatnya perbedaan antara teori dengan hasil yang diperoleh serta adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu untuk memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian ini **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”**.

### 1.3 Perumusan Masalah

Terdapatnya isu-isu mengenai kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidak bertanggung jawab atas aktivitas kegiatan usaha membuat pelaku ekonomi sadar bahwa keuntungan bukan lagi menjadi orientasi utama perusahaan dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Hal ini membuat organisasi bisnis modern mendapat tekanan dari para *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk membenarkan kegiatan operasi mereka guna menghasilkan keuntungan. Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 613 perusahaan *go public* terdaftar di Bursa Efek Indonesia ([www.idx.id](http://www.idx.id)). Namun, dari 613 perusahaan tersebut hanya terdapat 46 perusahaan dari berbagai sektor yang menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai pedoman *Global Reporting Initiative G4*.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan *sustainability report* antara lain profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik. Ditemukan fenomena yang berbeda dari setiap variabel pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Adanya fenomena juga diikuti dengan ditemukannya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya.

### 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan publik, dan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
2. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
3. Apakah ada pengaruh secara parsial:
  - a. Profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2015-2017?

- b. *Leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
- c. Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
- d. Kepemilikan publik terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, dan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017
  - b. *Leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017
  - c. Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017

- d. Kepemilikan publik terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek diantaranya sebagai berikut.

### **1.6.1 Aspek Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, konsep atau teori bagi peneliti dalam pemahaman ilmu yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* dan laporan keberlanjutan.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna serta menjadikan referensi penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, *corporate social responsibility*, dan laporan keberlanjutan.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan empat variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan keberlanjutan. Faktor determinan, dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan publik. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dengan periode tertentu. Data ini diambil dari laporan keuangan setiap perusahaan serta laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang terdaftar di setiap *website* resmi perusahaan.

### **1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) tahun 2015-2017.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoretis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, profitabilitas, dan *leverage*. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.